



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PANTJANINGSIH SRI REJEKI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 216260

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.292.640.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/250 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 629.840.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/250 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 482.800.000
3. Tanah Seluas 274 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 471 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
5. Tanah Seluas 543 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 696.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, HONDA CITY GM6 1.5 E MT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
3. MOTOR, HONDA MOTOR BEBEK Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
4. MOBIL, HONDA HONDA CRV / SUV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 448.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 500.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 647.112.407



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.135.752.407
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.135.752.407

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.